



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY FAUZIAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 242673

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.460.000.000

1. Tanah Seluas 2400 m² di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m²/144 m² di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 3600 m² di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 108.934.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.752.284.000
III. HUTANG	Rp.	66.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.685.884.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.